

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN PANGKEP**

**HARLINA MUNIR
NIM : 1661201260**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2020**

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN PANGKEP**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

HARLINA MUNIR
NIM : 1661201261

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

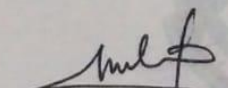
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN PANGKEP**

Disusun dan diajukan oleh

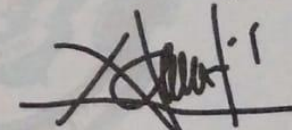
HARLINA MUNIR
1661201260

Telah diperiksa dan setuju untuk diujikan.

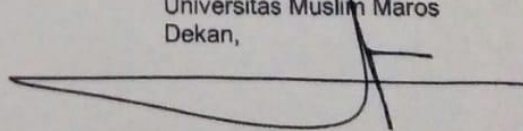
Pembimbing I


Nurfaela, S.E., M.M.

Pembimbing II


Narto Irawan Otoluwa, S.E., M.M.

Maros, 10 Agustus 2020
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,



Dr. Dahlan, S.E., M.M.
NIP/NIDN.: 0931125807

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP TINGKAT
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN PANGKEP

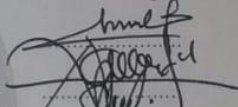
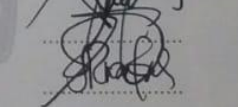
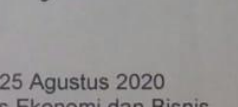
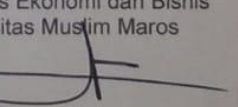
disusun oleh:

HARLINA MUNIR

1661201260

Telah diujikan dan diseminarkan
pada tanggal 23 Agustus 2020

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Nurlaela, S.E., M.M.	Ketua	
Narto Irawan Otoluwo, S.E., M.M.	Anggota	
Abd. Asis Pata, S.E., M.Si.	Anggota	
Sarnawiah, S.E., M.Si	Anggota	

Maros, 25 Agustus 2020
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,



Dr. Dahlan, S.E., M.M.
NIDN: 0931125807

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harlina Munir
NIM : 1661201260
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN PANGKEP

Adalah murni hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain kecuali kutipan dengan menyebutkan sumbernya dan mencantumkan di dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa didalam karya ilmiah ini mengandung unsur-unsur plagiasi, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maros, 13 Juli 2020

Yang menyatakan

Harlina Munir

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah Rabbil Aalamiin penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga skripsi “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemiskinan” dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen Keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros (UMMA).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang masih jauh dari kesempurnaan.

Tiada kata yang paling indah yang mampu penulis haturkan kepada kedua orang tua sebagai bantuan, bimbingan, doa dan dorongan yang bersifat materiil maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta dengan penuh kasih sayang serta kesabaran telah membesarkan dan mendidik penulis serta membiayai penulis hingga dapat menempuh pendidikan yang layak.
2. Prof. Nurul Ilmi Idrus, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Muslim Maros.
3. Dr. Dahlan, SE.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
4. Wakil Dekan I dan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
5. Nurlaela, SE.,M.M selaku pembimbing I dan Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas muslim Maros. Terimakasih atas arahan, bimbingan dan bantuan yang telah dibeikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Narto Irawan Otoluwa, SE.,M.M selaku pembimbing II, terimakasih atas arahan, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep beserta staf yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangkep beserta staf yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian.

9. Kepada teman-teman angkatan 2016 khususnya teman-teman konsentrasi Manajemen Keuangan yang telah memberikan masukan dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmatNya dan membalas kebaikan mereka semua dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata dengan segala kerendahan hati harapan penulis semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi diri penulis, pembaca dan semua pihak-pihak yang berkepentingan.

Maros, 13 Juli 2020

Penulis

ABSTRAK

HARLINA MUNIR. 2020. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep* (dibimbing oleh Nurlaela dan Narto Irawan Otoluwa).

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangkep dan data jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Pangkep. Sampel yang digunakan berupa data realisasi pendapatan asli daerah dan data jumlah dan persentase penduduk miskin selama 5 tahun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pendaptan asli daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan besarnya pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 28,8%.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7
B. Manajemen Keuangan	10
C. Pertumbuhan Ekonomi.....	13
D. Penelitian Terdahulu	18
E. Kerangka Pikir.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Tempat dan Waktu Penelitian	21
B. Jenis Data dan Sumber Data.....	21
C. Teknik Pengumpulan Data	22

D. Metode Analisis Data.....	23
E. Definisi Operasional Variabel	25
BAB IV SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN.....	31
A. Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep	31
B. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep	35
C. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Data.....	45
B. Analisis Data.....	46
C. Pembahasan	48
BAB VI PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2018.....	3
2. Penelitian Terdahulu.....	18
3. Interpretasi Koefisien Korelasi.....	25
4. Data Realisasi Penerimaan dan Persentase Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep.....	45
5. PDRB Kabupaten Pangkep Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha.....	46
6. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Pangkep Tahun 2015-2018.....	46
7. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	47
8. Hasil Uji Korelasi.....	48
9. Hasil Uji Determinasi.....	48

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	20
2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pangkep.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan suatu negara dalam membangun negaranya. Semua negara di dunia selalu berusaha maksimal agar pertumbuhan ekonominya meningkat dengan harapan kesejahteraan penduduknya juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dari ketiga komponen tersebut,

pendapatan merupakan indikator yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi di tingkat Nasional diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian, kemudian di tingkat daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan.

Kabupaten Pangkep adalah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah di antaranya sektor kelautan , Pertambangan, dan Kehutanan. Sektor-sektor tersebut merupakan modal yang besar untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah Pangkep.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah, maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini merupakan prinsip dari otonomi daerah. Sebagaimana telah diatur dalam UU No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk

menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah dan dapat pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi daerahnya masing-masing.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah.

Tabel 1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep tahun 2014-2018

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	%
1.	2014	73.566.873.652	-
2.	2015	74.558.076.756	1,35%
3.	2016	77.113.924.710	3,43%
4.	2017	74.222.750.176	(3,75%)
5.	2018	76.199.168.158	2,66%

Sumber : Data setelah diolah, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pangkep dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan dan melebihi target. Dimana pada tahun 2014 PAD Kabupaten Pangkep sebesar Rp 73.566.873.652,-. Kemudian pada tahun 2015 PAD Kabupaten Pangkep kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 74.558.076.756,-. Dan ditahun 2016 PAD Kabupaten Pangkep naik lagi menjadi 77.113.924.710,-. Kemudian pada tahun 2017 PAD Kabupaten Pangkep turun sebesar 74.222.750.176,-. Dan di tahun 2018 PAD Kabupaten pangkep kembali mengalami kenaikan sebesar 76.199.168.158,-.

Dari uraian di atas , maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pangkep dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terus mengalami peningkatan dan melebihi target yang ingin dicapai. Dari peningkatan PAD tersebut, peneliti ingin melihat apakah PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkep. Dari fenomena tersebut , maka peneliti tertarik meneliti dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Pangkep”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi” ?

C. Tujuan

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk digunakan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya dengan lebih luas dan mendalam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan tentang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis suatu masalah.

b. Bagi Universitas

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun tugas akhir mahasiswa.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberi kontribusi masukan kepada pemerintah daerah untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi tentang pendapatan asli daerah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Kemudian menurut Djaenuri (2012:88), "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Menurut Purnomo (2009:34), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi".

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain : pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Jenis pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi objek pendapatan adalah : retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adakah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam UU N0.33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis pendapatan ini meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah (pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004).

3. Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. PAD merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa tersebut.

B. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan menurut Irham Fahmi (2013), menyatakan bahwa “manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan

seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan”.

Manurut Sartono (2011:50), menyatakan bahwa “Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.

Kemudian menurut Musthafa (2017:3), menyatakan bahwa “Manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana dan keputusan kebijakan dividen.

1. Tujuan manajemen keuangan

Menurut Suad Husnan (2012:3) Pertimbangan sosial terhadap tanggung jawab yang dapat dilihat dari empat segi, yaitu :

- a. Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan

harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan.

- b. Memaksimumkan nilai perusahaan (atau harga saham) tidak identik dengan memaksimumkan laba per lembar (Earning Per Share). Hal ini disebabkan karena memaksimumkan EPS mengabaikan nilai waktu uang, dan tidak memperhatikan faktor risiko.
- c. Dengan demikian memaksimumkan nilai perusahaan juga tidak identik dengan memaksimumkan laba, apabila laba diartikan sebagai laba akuntansi. Sebaliknya memaksimumkan nilai perusahaan akan identik dengan memaksimumkan laba dalam pengertian ekonomi (economic profit).
- d. Dengan demikian tujuan pengelolaan keuangan tersebut sebenarnya bisa berlaku untuk siapa saja, bukan terbatas pada perusahaan. hanya saja untuk level perusahaan di beberapa kekhususan.

2. Fungsi manajemen keuangan

Menurut Suad Husnan (2012:3), fungsi utama manajemen keuangan ada 4, yaitu :

- a. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Dengan demikian, dalam perusahaan , kegiatan tersebut tidak terbatas pada “Bagian Keuangan”.

- b. Manajemen keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial market. Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktivitas perusahaan, untuk mendanai kegiatan perusahaan. kalau kegiatan memperoleh dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva finansial, maka kegiatan menanamkan dana membuat perusahaan memiliki aktiva riil.
- c. Dari kegiatan menanamkan dana (disebut investasi), perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya.
- d. Dengan demikian manajer keuangan perlu mengambil keputusan tentang penggunaan dana (disebut sebagai keputusan investasi), memperoleh dana (disebut sebagai keputusan pendanaan), pembagian laba (disebut sebagai kebijakan dividen).

C. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian pertumbuhan ekonomi

Menurut Putro (2010:24), “Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Kemudian menurut Sadono Sukirno (2011) menyatakan bahwa “Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah”.

Menurut Boediono (2010:28) “Pertumbuhan ekonomi yang berarti perluasan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

2. Indikator pertumbuhan ekonomi

Indikator pertumbuhan ekonomi menurut Imamul dan Gina (2009:11) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemudian cara mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Indikator yang digunakan selain PDRB untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, dapat juga dilihat dari pendapatan riil perkapita, kesejahteraan penduduk, dan tingkat penyerpan tenaga kerja dan pengangguran.

3. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi

a. Sumber daya manusia (SDM)

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang

memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

b. Sumber daya alam (SDA)

Sebagian besar negara berkembang bertumou kepada sumber daya alam (SDA) dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktifitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d. Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembanguna ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga

menjadi penghambatan pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan sebagainya.

e. Sumber daya modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

4. Teori pertumbuhan ekonomi

a. Teori klasik

1) Teori Adam Smith

Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya penambahan penduduk. Dengan adanya penambahan penduduk maka akan terdapat penambahan output atau hasil.

2. Teori David Ricardo

Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah.

Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemangan.

b. Teori neoklasik

1) Teori Robert Solow

Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

2) Teori Harrod Domar

Harrod Domar beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ulfi Maryati dan Endrawati ISSN1858-3687 Vol.5 No.2 (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Analisis regresi berganda, Uji simultan (f), Koefisien determinasi (R^2), dan Uji t.	PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.	Prakarsa, dkk (2014)	Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012).	Regresi linear berganda, Uji simultan (f), koefisien determinasi, Uji t.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara kurang signifikan dan berpengaruh negatif, sementara belanja barang dan jasa berpengaruh secara positif dan signifikan, lalu belanja modal berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap

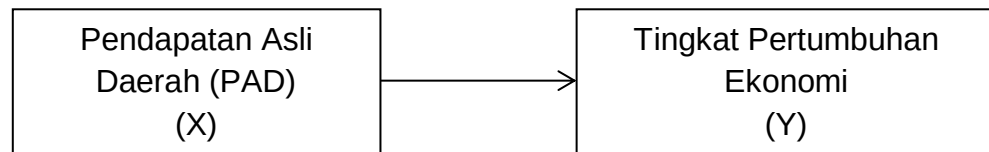
				pertumbuhan ekonomi.
3.	Rori, dkk (2016)	Analisis Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001- 2013.	Analisis regresi sederhana, Koefisien determinasi, dan Uji t.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas atau PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau pertumbuhan ekonomi.

E. Kerangka Pikir

Menurut Purnomo (2009:34), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi".

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (2010:28) "Pertumbuhan ekonomi yang berarti perluasan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dimunculkan kerangka pikir untuk menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1. Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pangkep melalui analisis yang dilakukan peneliti, dapat memperlihatkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat atau obyek penelitian pada pemerintah daerah Kabuptaen Pangkep. Dalam hal ini peneliti mengambil data pada kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan, dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020.

B. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis data

- a. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung dan diperoleh secara langsung yang berupa bilangan atau angka-angka dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep.
- b. Data Kualitatif, yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol dan bilangan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep.

2. Sumber data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan yang menjadi objek penelitian dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku, laporan keuangan, buku referensi, serta informasi-informasi lainnya yang berasal dari objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka (Library Research)

Teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, literatur dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahannya yang diteliti untuk menambahkan beberapa data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang peneliti angkat.

- b. Studi Lapangan (Field Research)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep.

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan. Data yang digunakan peneliti adalah data time series selama 5 tahun terakhir yakni tahun 2014-2018. Metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Regresi Linear Sederhana

Analisis ini menurut Sugiyono digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel terikat, bila ada satu variabel bebas dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Rumus regresi linear sederhana yaitu :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : Variabel Terikat

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X : Variabel Bebas

2. Koefisin Korelasi (Uji r)

Menurut Sugiyono (2014:248) analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel dimana variabel lainnya dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap

(sebagai variabel control). Variabel yang diteliti adalah data rasio maka teknik statistik yang digunakan adalah Korelasi Pearson Product Moment.

Menurut Sugiyono (2014:248) penentuan koefisien korelasi dengan menggunakan analisis Korelasi Pearson Product Moment dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n. (\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n. \sum X^2 - (\sum X)^2\}} \sqrt{\{n. \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Koefisien Korelasi

n = Periode (Tahun)

X = Variabel Bebas

Y = Variabel Terikat

Adapun kriteria penilaian korelasi dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 3. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Koefisien
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah

0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017:216)

3. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus koefisien determinasi yaitu :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi yang dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah :

- Jika KD mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
- Jika KD mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

E. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel bebas dan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat.

1. Pendapatan asli daerah (PAD)

Menurut Budi S. Purnomo (2009:34), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi”.

Berdasarkan pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adakah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis pendapatan ini meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah (pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel bebas yaitu data pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2018. Kemudian data tersebut dianalisis dengan

menggunakan metode analisis yang dijelaskan sebelumnya untuk mengetahui hubungan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB).

2. Pertumbuhan ekonomi

Menurut Boediono (2010:28) “Pertumbuhan ekonomi yang berarti perluasan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Indikator pertumbuhan ekonomi menurut Imamul dan Gina (2009:11) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemudian cara mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Adapun faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yaitu :

a. Sumber daya manusia (SDM)

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga di dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). SDM meruoakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

b. Sumber daya alam (SDA)

Sebagian besar negara berkembang bertumou kepada sumber daya alam (SDA) dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktifitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d. Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembanguna ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambta pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat meghambat proses

pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan sebagainya.

e. Sumber daya modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

BAB IV

SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep terbentuk pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUHP 7/12 hal. 41-101 tentang Struktur dan tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan BKDH Tk. II Pangkep Tahun 1991 dan Surat-surat Keputusan Mendagri Nomor. 29/V/1991 Nomor 23 Tahun 1989 s/d Surat Keputusan BKDH Tk. II Pangkep No. 20/V/1990 Tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata kerja Dipenda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang pembentukan organisasi dinas-dinas dalam lingkup pemerintahan kabupaten Pangkejene dan Kepulauan dan Keputusan Bupati Pangkejene dan Kepulauan Nomor : 219 tahun 2001 Tentang Yang terakhir Nomor : 12, Uraian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari Masa ke Masa

a. SABANI AS, BA pada tahun 1974 s.d 1976.

- b. M. JABBARI pada tahun 1976 s.d 1979.
- c. H.M ZAENAL pada tahun 1979 s.d 1985.
- d. Drs. SOALIHU KARIM Tahun 1985 s.d 1989.
- e. H.M YUNUS KADIR, BA Pada tahun 1989 s.d 1990.
- f. H. ANWAR ANDI HILAL, BA pada tahun 1990 s.d 1995.
- g. Drs.H. ABBAS MARSUKI pada tahun 1996 s.d 1999.
- h. Drs. ABD.RAHIM NUR pada tahun 1999 s.d 2000.
- i. Drs. ABD.KARIM pada tahun 2000 s.d 2005.
- j. Drs. H. SYAFRUDDIN MUHAMMAR, M.M. pada tahun 2005 s.d 2010.
- k. Dra. Hj. JUMLIATI, M.Si (DPKD) pada tahun 2010 s.d 2012.
- l. Drs. YATHRIB PARE pada tahun 2012 s.d 2019.
- m. Dra. HASMA RAPPUNG (Plt.Bapenda) pada tahun 2019 s.d 2020.
- n. IRDAS, S.H.,M.H. (Plh.Bapenda) pada tahun 2000 s.d sekarang.

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki **Visi** : “Meningkatkan kemandirian daerah dalam

pembiayaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan asli daerah”, sementara **Misi** dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu : “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tatanan daerah dan pilau-pulau”. Yang mana tercakup pada misi ke lima (V) yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupataen Pangkajene dan Keplauan.

Dalam pencapaian kinerja maka Bapenda memiliki **Motto** “**SINERGI**”, Profesional, Integritas, Energik dan Inovatif.

3. Program Kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Study pengembangan wawasan.
- 2) Menumbuhkan etos kerja dan budaya kerja.
- 3) Tour of duty dan tour of area.
- 4) Peningkatan kesejahteraan pegawai.

b. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Pemantauan, pengendalian dan evaluasi rencana penerimaan pajak.
- 2) Koordinasi pengeloaan pajak dan retribusi daerah.
- 3) Verifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Penyusunan kebijakan pengelolaan bidang pendapatan.

- 5) Penyusunan laporan penerimaan daerah.
- 6) Penyusunan sistem informasi Pendapatan Asli Daerah.

c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan rRetribusi Daerah

- 1) Penggalan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Baru.
- 2) Perluasan Objek Pajak Baru.
- 3) Antisipasi Pungutan Pajak Baru.
- 4) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Objek/Subjek Wajib Pajak dan Ewajib Retribusi Daerah.
- 5) Pelaksanaan uji petik titik potensi Pendapatan Asli Daerah.
- 6) Pemutakhiran data dan perhitungan potensi pajakdan retribusi daerah.
- 7) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 8) Penyelesaian keberatan atas ketetapan pajak.
- 9) Pelaksanaan penegihan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 10) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- 11) Monitoring dan Validasi data penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dan penerimaan dari provinsi.

d. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB

- 1) Penyusunan Estimasi Penerimaan BPHTB berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.

- 2) Pelaksanaan verifikasi pembayaran kurang wajar atas pembayaran BPHTB.
- 3) Penyuluhan dan Sosialisasi masyarakat sadar membayar pajak.
- 4) Optimalisasi penerimaan BPHTB.
- 5) Optimalisasi PBB-P2.
- 6) Peremajaan data objek dan subjek PBB-P2.

B. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep

1. Pajak Daerah

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2010 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat (6) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.

b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas oenggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangna jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alm di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk di dimanfaatkan.
- g. Pajak Perparkiran adlah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau kerana memperoleh jasa pekerjaan, usaha

atau milik daerah untuk kepentingan umum, karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, juga berpedoman pada KEPMENDAGRI No. 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum. Jenis –jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- 5) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- 6) Retribusi pelayanan pasar.
- 7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

8) Retribusi penggantian biaya cetak peta.

9) Retribusi pengujian kapal perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

1) Retribusi pemakaaian kekayaan daerah.

2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

3) Retribusi tempat pelanggan

4) Retribusi terminal

5) Retribusi tempat khusus parkir.

6) Retribusi temoat penginapan/pesanggraha/villa.

7) Retribusi penyedotan kakus.

8) Retribusi rumah potong hewan

9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.

10) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

11) Retribusi pengolahan limbah cair.

12) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu dalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pemamfaatan atas kegiatan pemamfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- 3) Retribusi izin gangguan.
- 4) Retribusi izin trayek.

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

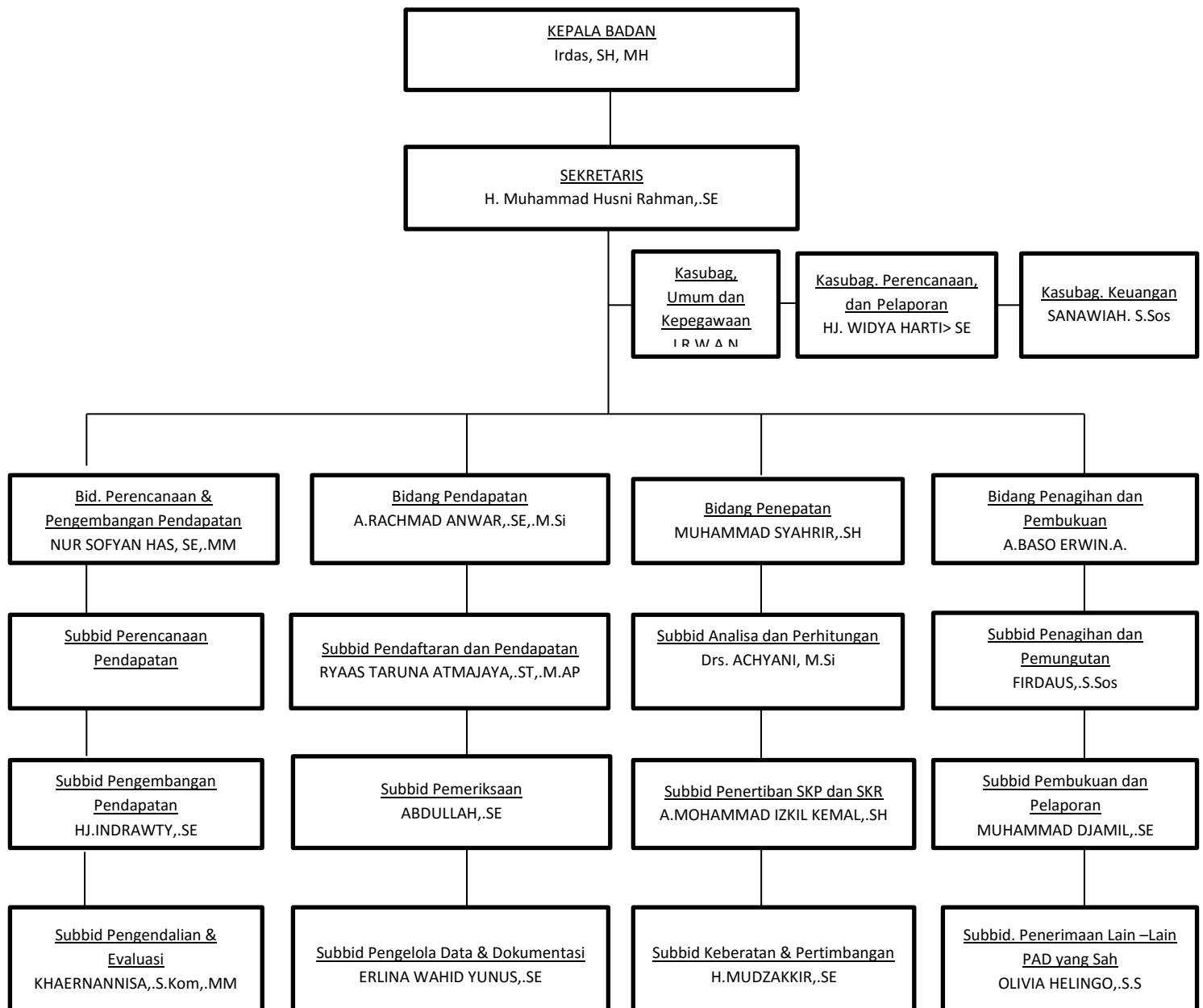
Bagian laba BUMD adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan Perusahaan Daerah ialah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang pisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Penerimaan selain yang disebutkan diatas tetapi sah. Penerimaan ini mencakup penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain-lain yang sah menurut Undang-undang.

C. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Kabupaten Pangkep



Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab.Pangkep

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Ketatausahaan Badan, urusan umum, Kepegawaian, peningkatan pendapatan, perencanaan, dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- C. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
- b. Sub Bidang Pengembangan
- c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

4. Bidang Pendataan

Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengordinasian pendataan dan pengawasan pendapatan daerah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, mengatur dan mengendalikan kegiatan pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, pengelolaan data informasi objek/subjek Pajak

Daerah/Retribusi Daerah dan PBB-P2 dan BPHTB serta pendapatan lain-lainnya.

Bidang Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
- b. Sub Bidang Pemeriksaan
- c. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi

5. Bidang Penetapan

Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengordinasian penetapan pajak daerah/retribusi daerah dan pendapatan lain-lainnya yang sah, merencanakan, melaksanakan dan menerbitkan penetapan Pajak/Retribusi Daerah yang terutang dan penatausahaannya, serta pengesahan PBB-P2 dan BPHTB.

Bidang Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Analisa
- b. Sub Bidang Penertiban Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atau surat keterangan Retribusi Daerah (SKRD)
- c. Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan

6. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan Pengelolaan Penagihan dan Pembukuan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, mengatur dan mengendalikan kegiatan bidang penagihan dan pembukuan yang meliputi pembiayaan perubahan penagihan Pajak (PBB-P2 dan BPHTB)/Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya serta memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengkoordinir, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas pengelolaan penagihan dan pembukuan melalui Simda Pendapatan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penagihan dan Pemungutan
- b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- c. Sub Bidang Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Data pendapatan asli daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep.

Tabel 4. Realisasi penerimaan dan persentase perubahan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pangkep

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	%
1.	2014	73.566.873.652	-
2.	2015	74.558.076.756	1,35%
3.	2016	77.113.924.710	3,43%
4.	2017	74.222.750.176	(3,75%)
5.	2018	76.199.168.158	2,66%

Sumber : Data setelah diolah, 2020

2. Data Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 5. PDRB Kabupaten Pangkep atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha.

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.	2014	12.419.763,40	-
2	2015	13.367.009,34	7,63
3.	2016	14.477.292,27	8,31
4.	2017	15.433.504,00	6.60
5.	2018	16.168.906,00	4,76

B. Analisis Data

1. Analisis regresi linear sederhana

Tabel 7. Hasil uji regresi linear sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-27152580.385	37670449.070		-.721	.523
PAD	.001	.001	.537	1.103	.351

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Output SPSS 21

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil persamaan model estimasi adalah srebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = -27152580,385 + 0,001X$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar -27152580,385, artinya jika nilai Pendapatan Asli Daerah (X) adalah 0, maka pertumbuhan ekonomi (Y) nilainya sebesar -27152580,385.
- b. koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X) sebesar 0,001
Menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1 Pendapatan Asli Daerah (X), akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0,001.
Koefisien PAD bernilai positif, maka PAD mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Analisis koefisien korelasi

Tabel 8. Hasil uji korelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.537 ^a	.288	.051	1476329.50154

a. Predictors: (Constant), PAD

Sumber : Output SPSS 21

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya hubungan antara pendapatan asli daerah (X) dan pertumbuhan ekonomi (Y) yang dihitung dengan koefisien korelasi ditunjukkan dengan nilai R

sebesar 0,537, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tergolong korelasi sedang.

3. Analisis koefisien determinasi

Tabel 9. Hasil uji determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.537 ^a	.288	.051	1476329.50154

a. Predictors: (Constant), PAD

Sumber : Output SPSS 21

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R square adalah 0,288, artinya pengaruh pendapatan asli daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 28,8% sedangkan 71,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi.

C. Pembahasan

Dari hasil analisis di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep tahun 2015-2018 berfluktuasi. Kemudian hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Pangkep mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya apabila PAD meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Kemudian pada hasil uji korelasi menunjukkan bahwa hubungan pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi tergolong korelasi sedang. Selanjutnya pada hasil

uji determinasi menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 28,8%.

Hasil uji analisis di atas sejalan dengan penelitian Ulfi Maryati dan Endrawati (2010), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Prakarsa, dkk (2014), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep tahun 2014-2018 mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi . Kemudian besarnya pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 28,8%.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep

Agar selalu berupaya maksimal dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran PAD yang dihasilkan tepat sasaran agar dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menambah beberapa variabel dalam penelitian ini seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

DAFTAR PUSTAKA

- Aries Djaenuri. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Bogor.
- Adam Smith. *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- BAPENDA Kabupaten Pangkep 2019. *Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2018*.
- Boediono. 2010. *Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi*, Edisi Ketiga, Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Budi, Purnomo S. 2009. *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- David Ricardo. 2008. *Teori Pertumbuhan Klasik..* PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2013. *Analisi Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harrord, Domar. 1975. *Teori Model-Model Pertumbuhan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Imamul, A.H. dan Gina. 2009. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo.
- Musthafa. 2017. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Putro, N.S. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Prakarsa, dkk. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 2*, No. 2.
- Rori, dkk. 2016. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16, No.2.
- Robert, Solow. 1995. *Teori Pertumbuhan Neo Klasik*. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : PT. RajaGrafindo.
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Keenam Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Studi Kasus di Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol.5. No.2.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No.34 Tahun 2000. *Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No.9 Tahun 2015. *Tentang Pemerintahan Daerah*.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP
DATA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO		URAIAN	TAHUN								KETERANGAN
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pajak dan Retribusi Daerah.	42,261,416,415.00	67,389,509,608.00	73,566,873,652.84	74,365,691,947.00	77,114,473,492.00	74,222,750,176.00	76,199,168,158.16	75,979,128,759.02	
I		Pajak Daerah **	40,923,428,665.00	65,498,191,708.00	71,703,863,292.84	72,530,832,467.00	75,565,957,992.00	72,915,174,176.00	75,013,342,158.16	74,910,486,759.02	
	1	Pajak Hotel	11,675,000.00	13,800,000.00	16,250,000.00	20,350,000.00	24,800,000.00	22,275,000.00	22,800,000.00	21,847,500.00	
	2	Pajak Restoran	87,700,050.00	94,747,400.00	88,883,150.00	85,788,000.00	147,317,500.00	193,925,000.00	213,481,000.00	1,161,160,556.00	
	3	Pajak Hiburan	700,000.00	1,000,000.00		600,000.00	20,250,000.00	12,950,000.00	14,650,000.00	11,150,000.00	
	4	Pajak Reklame	124,584,437.00	102,753,750.00	165,988,750.00	212,991,000.00	201,588,750.00	369,282,500.00	461,588,750.00	537,838,125.00	
	5	Pajak Peningkatan Jalan	9,020,730,558.00	17,047,564,963.00	15,712,315,580.00	18,590,758,470.00	18,584,535,372.00	21,274,654,365.00	22,019,431,462.00	21,662,001,104.44	
	6	Pajak Mineral Bukan Logam	31,637,753,820.00	47,360,676,747.00	50,870,866,499.00	50,012,463,711.00	51,112,713,802.00	45,336,785,137.00	45,267,065,206.00	45,326,743,302.00	
	7	Pajak Air Bawa Tanah	34,294,800.00	32,654,000.00	23,100,700.00	68,291,000.00	48,193,000.00	49,021,200.00	41,101,600.00	67,452,200.00	
	8	Pajak Parkir	5,990,000.00	3,700,000.00	7,200,000.00	6,000,000.00	7,200,000.00	14,940,000.00	18,570,000.00	18,570,000.00	
	9	Pajak PBB-P2		841,292,848.00	3,766,269,451.34	2,987,905,888.00	3,171,023,990.00	3,647,927,932.00	3,650,514,807.16	3,988,367,780.68	
	10	Pajak BPHTB			1,052,986,152.50	545,683,418.00	2,237,435,578.00	1,960,433,042.00	3,174,138,333.00	2,125,375,181.90	
II		Retribusi Daerah ***	1,337,987,750.00	1,891,317,900.00	1,863,010,360.00	1,834,859,430.00	1,549,415,500.00	1,307,576,000.00	1,185,826,000.00	1,068,633,000.00	
	1	Retribusi Jasa Umum	966,162,750.00	1,131,717,900.00	1,151,967,360.00	1,029,920,430.00	288,308,000.00	321,451,000.00	308,761,000.00	288,538,000.00	
		Retribusi Parkir di tepi jalan	154,660,000.00	176,141,000.00	178,948,000.00	251,816,000.00	288,308,000.00	321,451,000.00	308,761,000.00	288,538,000.00	
		Retribusi Pelayanan Pasar	611,502,750.00	955,576,900.00	973,019,360.00	778,104,450.00					
	2	Retribusi Jasa Usaha	371,825,000.00	759,600,000.00	711,043,000.00	804,939,000.00	1,261,107,500.00	986,125,000.00	877,065,000.00	772,895,000.00	
		Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	364,125,000.00	746,200,000.00	711,043,000.00	804,939,000.00	1,261,107,500.00	986,125,000.00	877,065,000.00	772,895,000.00	
		Ret. Pasar Grosir	7,700,000.00	13,400,000.00							

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2019

Kategori	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (Juta Rupiah)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,502,577.86	1,620,763.13	1,648,160.09	1,714,847.04	1,895,696.31	2,025,498.52	2,174,805.23	2,350,188.00	2,584,260.00	2,833,958.00
B. Pertambangan dan Penggalian	774,672.63	851,428.42	897,458.50	919,560.79	993,446.61	1,072,757.43	1,199,399.95	1,297,271.00	1,439,249.00	1,602,197.00
C. Industri Pengolahan	4,191,681.52	4,659,342.28	5,107,100.10	5,771,529.60	6,522,200.66	7,077,958.41	7,741,444.35	8,132,345.00	8,143,996.00	8,410,848.00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,863.90	6,226.66	7,257.01	7,823.25	9,287.88	8,958.56	9,784.56	10,362.00	10,687.00	10,800.00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,892.85	4,228.75	4,463.47	4,729.12	4,746.44	4,762.57	4,918.77	5,295.00	5,872.00	6,040.00
F. Konstruksi	418,211.76	458,296.56	488,141.53	527,196.82	540,861.41	585,837.90	638,136.52	695,607.00	769,827.00	832,623.00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	462,994.15	495,677.78	559,498.12	622,042.10	667,434.88	725,277.80	782,096.17	862,718.00	976,085.00	1,068,953.00
H. Transportasi dan Pergudangan	334,915.15	376,847.05	414,143.02	440,364.30	491,112.06	472,269.96	459,736.57	514,589.00	548,052.00	620,142.00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38,055.70	40,134.57	44,648.00	47,963.69	51,181.06	54,442.80	58,217.58	65,157.00	75,352.00	81,639.00
J. Informasi dan Komunikasi	134,218.70	144,585.22	177,478.66	204,187.88	204,631.71	226,480.51	244,242.89	260,851.00	295,767.00	330,117.00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	74,838.65	83,391.17	93,489.31	103,850.17	108,634.18	116,713.96	134,814.52	136,162.00	134,850.00	137,527.00
L. Real Estate	132,901.68	140,833.71	155,929.35	170,516.03	191,656.91	205,820.14	219,630.02	238,013.00	253,103.00	268,217.00
M,N. Jasa Perusahaan	561.56	579.00	633.93	682.88	706.28	745.90	797.74	856.00	973.00	1,074.00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	353,965.63	373,859.64	388,185.13	393,409.15	402,788.44	424,521.55	419,998.50	440,631.00	465,628.00	498,265.00
P. Jasa Pendidikan	131,910.85	150,085.93	182,199.37	190,313.48	194,495.67	210,480.20	223,778.41	243,180.00	267,923.00	287,976.00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88,911.12	94,586.51	116,342.18	125,880.33	137,195.68	150,452.06	161,123.51	175,496.00	191,774.00	208,755.00
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,454.78	2,948.11	3,514.50	3,582.12	3,687.22	4,031.07	4,366.99	4,784.00	5,507.00	6,033.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,652,628.48	9,503,814.47	10,288,642.27	11,248,478.74	12,419,763.40	13,367,009.34	14,477,292.27	15,433,504.00	16,168,906.00	17,205,165.00

Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pangkajene, 16 Juli 2020
Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan


Muhammad Aswar

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus 1 : Jalan Dr. Ratulangi No 62 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018
e-mail : lppmummayapimmaros@gmail.com, Kode Pos 90511
Kampus 2 : Jalan Kokoa – Pamelakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros



Maros, 11 Juni 2020

Nomor : 1372/ LPPM-UMMA/VI/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Pangkep

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka penyelesaian studi akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros (FEB-UMMA) tahun akademik 2019/2020 maka kami mohon kiranya bapak/ibu dapat memberikan permohonan izin penelitian kepada mahasiswa kami di bawah ini pada lokasi sebagaimana tercantum dalam proposal yang terlampir.

Adapun data diri Mahasiswa tersebut yaitu :

Nama : Harlina Munir
Nim : 1661201260
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen Keuangan
Lokasi Penelitian : Jl. Matahari, Bonto Kio, Kab. Pangkep
Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua LPPM Universitas Muslim Maros



Dr. Suhartina R, S.Pd., M.Hum
NIDN. 0914017001

Tembusan kepada Yth :

1. Biro Administrasi Akademik Universitas Muslim Maros
2. Dekan FEB Universitas Muslim Maros
3. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Sultan Hasanuddin Km. 3 Pangkep (90611) Email dispendapangkep@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 095/262 /IX/Bapenda/2020

Sehubungan surat Universitas Muslim (UMMA) Maros Nomor : 1372/LPPM-UMMA/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian penulisan skripsi Program Strata satu Manajemen Keuangan dengan Judul Skripsi **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**, maka bersama ini :

MENERANGKAN

Nama : Harlina Munir
Nim : 1662201260
Program Studi : Manajemen Keuangan

Telah melakukan penelitian program Strata Satu selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 15 Juni s/d 18 Agustus 2020 di Badan Pendapatan Daerah Kab. Pangkep

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkajene, 18 Agustus 2020

Plt. KEPALA BADAN

IRDAS, SH. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660920 199303 1 011

Tembusan:disampaikan KepadaYth

1. Bapak Bupati Pangkep (sebagai laporan) di Pangkajene
 2. Ketua LPPM Universitas Muslim Maros di Maros
- Pertinggal---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Harlina Munir lahir di Pangkajene pada tanggal 19 Agustus 1982, anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Abd. Munir dan Habubah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Alamat Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis mulai memasuki jenjang pendidikan di SD Negeri 39 Tamalalang pada tahun 1989 dan lulus pada tahun 1995. Pada tahun 1995 melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 2 Pangkajene dan lulus pada tahun 1998. Pada tahun 1998 melanjutkan pendidikan di SMU Negeri 1 Pangkajene dan lulus pada tahun 2001. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muslim Maros (UMMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan Program Studi Srata Satu (S1) Konsentrasi Manajemen Keuangan. Penulis menyelesaikan pendidikan dengan menyusun Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di kabupaten Pangkep”**.